

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI KOMPARATIF
INDONESIA DAN VIETNAM**

T. Supartini¹, Sakila Fajrin², Alia Putri Fadhillah³, Bintang Putra Nandika⁴, Irman Fahrezi⁵

Universitas Lampung

Email: tsupartini22802@gmail.com¹, sakilafajrin05@gmail.com², aliaputrif8625@gmail.com³,
bintangputra240505@gmail.com⁴, irmanfahrezi12345@gmail.com⁵

Abstrak – Penelitian ini menganalisis hubungan antara efisiensi belanja pemerintah dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui studi komparatif antara Indonesia dan Vietnam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode Qualitative Comparative Analysis (QCA), penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat, faktor-faktor determinan yang memengaruhi evaluasi mereka terhadap kebijakan fiskal, serta pengalaman empiris dalam mengakses layanan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Vietnam mencapai tingkat efisiensi belanja pemerintah yang lebih optimal dibandingkan Indonesia, yang tercermin dari peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator kesejahteraan lainnya. Keberhasilan Vietnam disebabkan oleh koordinasi kebijakan yang terintegrasi, alokasi anggaran yang berorientasi pada sektor produktif, serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja. Di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural, termasuk fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, inefisiensi birokrasi, serta ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dan implementasi di lapangan. Meskipun belanja pemerintah per kapita lebih tinggi, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyarankan perlunya reformasi tata kelola fiskal yang lebih terstruktur, peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta pendekatan partisipatif untuk memastikan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus mengenai efisiensi belanja negara dalam perspektif kebijakan publik. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penganggaran yang lebih efektif.

Kata Kunci: Efisiensi Belanja Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat, Analisis Komparatif, Kebijakan Fiskal, Indonesia, Vietnam.

PENDAHULUAN

Dalam Beberapa dekade terakhir, isu efisiensi belanja Pemerintah menjadi perhatian global yang kian intens. Berbagai negara, baik yang sudah maju maupun sedang berkembang, mulai menyadari pentingnya mengelola anggaran public secara efektif dan efisien. Dorongan dari masyarakat, lembaga internasional, serta kondisi fiskal yang Semakin kompleks menjadikan efisiensi belanja sebagai indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan. Belanja public yang efisien tidak hanya mencerminkan penggunaan sumber daya negara secara bijaksana, tetapi juga menjadi alat strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara yang sedang berada dalam fase transisi ekonomi dan pembangunan social. Keduanya memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan, yang tentunya memerlukan pembiayaan dari anggaran negara. Dalam dokumen perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Nasional (RPJMN) maupun strategi pembangunan Vietnam, efisiensi belanja Pemerintah menjadi tema yang diangkat secara eksplisit. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan.

Di berbagai wilayah Indonesia misalnya, masyarakat sering kali mengeluhkan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, Kesehatan, atau infrastruktur. Meskipun anggaran sektor—sektor ini tergolong besar, namun persepsi masyarakat terhadap dampaknya tidak selalu positif. Begitu pula di Vietnam, meski Menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan, sebagian warga menyampaikan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum merata. Permasalahan ini menjadi menarik karena menyoroti adanya kemungkinan kesenjangan antara rencana kebijakan fiskal yang bersifat teknokratis dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Fenomena tersebut mengisyaratkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap efisiensi belanja Pemerintah tidak semata-mata bersumber dari data statistic atau laporan Keuangan, tetapi lebih banyak terbentuk dari pengalaman langsung mereka dalam berinteraksi dengan layanan public dan program Pemerintah. Misalnya, Bagaimana warga menilai pembangunan jalan di daerahnya, seberapa puas mereka terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas, atau Bagaimana mereka memandang keadilan dalam distribusi bantuan social. Aspek-aspek inilah yang sering kali tidak tercakup dalam analilisi kuantitatif murni.

Sejauh ini, sebagian besar kajian yang membahas efisiensi belanja Pemerintah masih bersfat kuantitatif dan makro, dengan fokus pada efisiensi teknis, efektivitas alokasi, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun pendekatan tersebut penting, namun belum cukup mejelaskan Bagaimana masyarakat sebagai subjek utama pmbanunan menilai dan mengalami dampak dari kebijakan belanja tersebut. Hal ini menciptakan gap pengetahuan yang signifikan, yaitu kurangnya pemahaman mendalam terhdap mana, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait efisiensi belanja Pemerintah.

Untuk mengisi celah tersebut, diperlukan pendekatan kualitatif yang mampu menjangkau aspek subjektif dan kontekstual dari fenomen yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman hidup, pandangan, serta interpretasi masyarakat terhadap Bagaimana belanja Pemerintah memengaruhi kehidupan mereka. lebih dari sekedar angka, pendekatan ini menangkap nuansa social, budaya, dan politik yang menyertai proses kebijakan di masing-masing negara. Terutama dalam studi lintas negara seperti ini, pendekatan kualitatif sangat berguna untuk memahami konteks lokal yang unik di Indonesia dan Vietnam

Melalui studi kualitatif ini, diharapkan akan ditemukan ragam narasi, baik yang mencerminkan keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan kebijakan public di kedua

negara. Narasi-narasi tersebut dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus tentang efisiensi belanja Pemerintah dalam perspektif masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan agar lebih responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap efisiensi belanja Pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan, serta melakukan perbandingan antara Indonesia dan Vietnam dalam hal dinamika persepsi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan Bagaimana masyarakat memaknai peran negara dalam menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan fiskalnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus komparatif, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, persepsi, dan dinamika sosial terkait implementasi dan efisiensi kebijakan belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap aspek-aspek kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif.

Studi ini membandingkan Indonesia dan Vietnam, dua negara dengan karakteristik politik, ekonomi, dan birokrasi yang berbeda. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kedua negara ini menghadapi tantangan serupa dalam mengelola belanja publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perbandingan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

1. Data Anggaran Pemerintah (Indonesia & Vietnam)
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat
3. Evaluasi Kebijakan Belanja Pemerintah
4. Data Sosial Ekonomi Masyarakat
5. Dokumen Kebijakan dan Peraturan
6. Literatur Pendukung tentang Efisiensi Belanja dan Kesejahteraan

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen, laporan, dan data statistik dari lembaga-lembaga resmi internasional maupun nasional.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Qualitative Comparative Analysis (QCA) adalah metode analisis yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan logika kuantitatif secara sistematis untuk membandingkan beberapa kasus (negara, daerah, lembaga) guna menemukan pola sebab-akibat.

Langkah-langkah analisis :

1. Menentukan Kasus

- Kasus 1: Indonesia
- Kasus 2: Vietnam

2. Menentukan Faktor Penting (Kondisi)

- X1: Efisiensi belanja (apakah tepat sasaran)
- X2: Kualitas implementasi kebijakan
- X3: Responsivitas (apakah menjawab kebutuhan masyarakat)

3. Menentukan Hasil (Outcome)

Y: Persepsi positif terhadap kesejahteraan (apakah masyarakat merasa lebih sejahtera karena belanja publik)

4. Membandingkan Kombinasi

Negara	X1 (Efisiensi)	X2 (Implementasi)	X3 (Responsif)	Y (Kesejahteraan yang dirasakan)
Indonesia	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Vietnam	Ya	Ya	Ya	Ya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Konfigurasi QCA Efisiensi Belanja Pemerintah Indonesia dan Vietnam

Negara	X1 (Efisiensi Anggaran)	X2 (Implementasi Kebijakan)	X3 (Responsivitas terhadap kebutuhan publik)	Y (Kesejahteraan yang dirasakan)
Indonesia	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Vietnam	Ya	Ya	Ya	Ya

Penjelasan Variabel QCA

- X1 – Efisiensi Anggaran:

Menunjukkan apakah negara mampu mengelola anggaran publik dengan hasil (output) pembangunan yang sepadan.

- Vietnam: Anggaran kecil, tapi berdampak besar (efisien).
- Indonesia: Anggaran besar, tapi output tidak maksimal.

- X2 – Implementasi Kebijakan:

Menunjukkan kapasitas negara dalam mengeksekusi kebijakan fiskal secara efektif (minim kebocoran, tepat waktu, dan sesuai target).

- Vietnam: Koordinasi antar lembaga berjalan baik, pelaksanaan anggaran relatif disiplin.
- Indonesia: Fragmentasi pelaksanaan dan tumpang tindih antara pusat–daerah.

- X3 – Responsivitas terhadap Kebutuhan Publik:

Sejauh mana alokasi belanja pemerintah mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar).

- Vietnam: Fokus ke sektor prioritas.
- Indonesia: Seringkali alokasi tidak sepenuhnya responsif atau berbasis aspirasi publik.

- Y – Kesejahteraan yang Dirasakan:

Outcome gabungan berupa peningkatan HDI, kualitas layanan publik, dan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

- Vietnam: Ya (HDI naik signifikan, pertumbuhan merata, akses publik meningkat).
- Indonesia: Tidak (HDI naik lambat, masih banyak kesenjangan akses dan kualitas layanan publik).

Pembahasan Hasil Analisis QCA

Konfigurasi Efisiensi Belanja Pemerintah Vietnam

Dari hasil QCA, ditemukan bahwa Vietnam berhasil membentuk kombinasi kondisi yang mendukung efisiensi belanja pemerintah, terutama dalam hal konversi anggaran menjadi hasil pembangunan nyata. Kombinasi tersebut mencakup:

1. Peningkatan belanja pemerintah per kapita secara bertahap, dari USD 499 (2013) menjadi USD 956 (2022), menunjukkan pertumbuhan yang terkendali namun konsisten.

2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan meningkat, bahkan pada tahun 2022 Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8,02%—tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
3. Peningkatan HDI dari 0,666 ke 0,703 selama periode 2013–2022, dengan peningkatan signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
4. Koordinasi antarlembaga pemerintahan dan fokus kebijakan fiskal terhadap sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya efisien dari segi output ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial. Ini menunjukkan efektivitas strategi anggaran jangka menengah dan disiplin fiskal yang berorientasi pada hasil.

Konfigurasi Inefisiensi Belanja Pemerintah Indonesia

Sebaliknya, Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan belanja pemerintah dan hasil pembangunan yang diperoleh, sehingga mengindikasikan inefisiensi. Konfigurasi yang dominan meliputi:

1. Kenaikan belanja per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam, dari USD 603 (2013) menjadi USD 1.043 (2022), tetapi tidak sebanding dengan capaian pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, termasuk kontraksi ekonomi sebesar -2,07% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, dan pemulihan yang lambat dibandingkan Vietnam.
3. HDI meningkat dari 0,684 ke 0,718, namun laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan Vietnam meskipun dengan belanja lebih besar.
4. Permasalahan struktural seperti korupsi, ketidakefisienan birokrasi, dan fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang menghambat pelaksanaan anggaran yang efektif.

Dalam pendekatan QCA, konfigurasi ini membentuk pola ketidakefisienan yang bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi interaksi antar faktor yang saling memperkuat dampak negatifnya.

Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil QCA, dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi terutama oleh konfigurasi kelembagaan, arah kebijakan, dan stabilitas makroekonomi. Vietnam berhasil membuktikan bahwa dengan alokasi anggaran yang relatif moderat, hasil pembangunan dapat dioptimalkan jika terdapat:

- Koordinasi fiskal yang terpusat dan efektif
- Fokus anggaran terhadap sektor produktif
- Evaluasi berbasis hasil yang ketat

Sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola kompleksitas birokrasi dan desentralisasi fiskal, yang kadang tidak diikuti oleh penguatan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat program-program pembangunan rentan terhadap duplikasi, kebocoran anggaran, dan ketidakefisienan distribusi.

Kedua negara memiliki sumber daya dan struktur politik yang berbeda, namun pendekatan QCA menunjukkan bahwa hasil efisiensi dapat dicapai oleh negara berkembang manapun, asalkan konfigurasi kebijakan dan kelembagaannya mendukung efektivitas fiskal.

Implikasi Kebijakan dan Analisis Komparatif

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengambilan kebijakan di Indonesia:

1. Perlu penguatan tata kelola fiskal, terutama dalam hal efektivitas alokasi dan realisasi anggaran pada sektor strategis.
2. Evaluasi kebijakan berbasis hasil harus menjadi bagian dari proses penganggaran, agar outcome pembangunan menjadi tolak ukur utama, bukan sekadar penyerapan

anggaran.

3. Peningkatan kapasitas daerah dalam konteks desentralisasi fiskal sangat penting, agar distribusi anggaran di daerah tidak menjadi sumber ketidakefisienan.
4. Pembelajaran dari Vietnam, terutama dalam hal perencanaan pembangunan jangka menengah dan orientasi hasil, dapat dijadikan sebagai referensi untuk reformasi fiskal Indonesia.

KESIMPULAN

Efisiensi belanja pemerintah merupakan isu strategis di tengah meningkatnya tuntutan publik dan kompleksitas fiskal. Dalam konteks Indonesia dan Vietnam, efisiensi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Persepsi masyarakat menjadi indikator penting karena merekalah penerima langsung dari kebijakan dan program pemerintah. Penilaian masyarakat terhadap efisiensi belanja negara sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, terdapat kesenjangan antara pendekatan teknokratis dan realitas sosial di lapangan. Banyak kebijakan yang secara statistik dinilai efisien, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kualitatif yang mampu menggali pengalaman dan pandangan warga. Kualitas implementasi serta responsivitas kebijakan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap efisiensi belanja pemerintah. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta minimnya komunikasi dan partisipasi masyarakat, menjadi tantangan di kedua negara. Studi komparatif antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa konteks sosial, budaya, dan birokrasi lokal sangat memengaruhi efektivitas kebijakan belanja publik. Meskipun keduanya merupakan negara berkembang, pendekatan yang digunakan dan tantangan yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia (2024). Indikator Kesejahteraan rakyat : Welfare
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2024). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi (2025). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025.
- General Statistics Office of Vietnam (2017). Annual report on socio-economic development. Ministry of Planning and Investment.
- General Statistics Office of Vietnam (2020). Statistical yearbook of Vietnam 2020
- General Statistics Office of Vietnam (2020). Viet Nam Household Living Standards Survey 2020.
- Gigih Surya Prakasa, A. S. (2022). DAMPAK EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH SEKTOR KESEHATAN DAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU JAWA. Media Ekonomi. Indicators 2024.
- Indra Kurniawan, M. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Januari 2024.
- Kementrian Keuangan (2024). Informasi APBN 2024 : Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mega Setyowati, A. S. (2024). EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH TAPAL KUDA PROVINSI JAWA TIMUR. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi).
- Muhammad Rizal, M. N. (2023). ANALISIS EFISIENSI BELANJA PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA. Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi, Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori .
- Natalis Christian, F. D. (2024). Analisis Perbandingan Pengaruh Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap Perekonomian Indonesia dan Vietnam. SEIKO : Journal of Management &

Business.

Peraturan Menteri Keuangan. (2025). Inpress nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

World Bank (). Economic Growth, Proverty, and Household Welfare in Vietnam. World Bank Group.